

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP DUKUNGAN KEPALA DAERAH  
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TERHADAP SALAH SATU PASANGAN CALON STUDI PASAL 281  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM**

**Oleh:**

**AZMIRAL HASSAN**

**1410112022**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)**



**Pembimbing :**

**Ilhamdi Taufik, S.H., M.H**

**Feri Amsari, S.H., LL.M**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP DUKUNGAN KEPALA DAERAH  
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TERHADAP SALAH SATU PASANGAN CALON STUDI PASAL 281  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN  
UMUM**

(AZMIRAL HASSAN, 1410112022, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 75 halaman, 2020)

**ABSTRAK**

Dukungan kepala daerah terhadap Pasangan Capres dan Cawapres pada Pemilu 2019 merupakan strategi kampanye yang banyak menuai pro dan kontra. Kepala daerah sebagai pejabat negara berkewajiban melayani rakyat, namun di lain hal kepala daerah juga seorang individu yang berhak untuk menduduki jabatan politik seperti bagian dari partai maupun tim sukses pemilu. Maka dari itu, dalam skripsi ini Penulis mengangkat beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam hal kepala daerah yang memberikan dukungan kepada salah satu pasangan capres cawapres tertentu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber-sumber data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan analitis. Dari pembahasan Penulis berkesimpulan bahwa Kepala daerah yang mendukung capres cawapres dengan menjabat sebagai tim kampanye mengabaikan etika sebagai pejabat. Di samping itu pengaturan mengenai dukungan kepala daerah secara khusus dan rinci dirasa perlu diadakan. Serta Penulis memberikan saran untuk kepala daerah untuk tidak menjadi bagian dari tim sukses capres cawapres untuk menghindari konflik kepentingan.

**Kata kunci:** Dukungan, Kepala Daerah, Pemilihan Umum